

PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN INKLUSIF DI JEPANG DAN INDONESIA : PENDIDIKAN UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Jeffry S. J. Lengkong¹, Marisca A. B. Sadsuitubun², Bella Felicita Rambitan³,
Syerri Y. Sumual⁴, Neiles Wakur⁵

Universitas Negeri Manado

Alamat e-mail : jeffrylengkong@unima.ac.id¹, mariscaangela24@gmail.com²,
rambitanb@gmail.com³, syerri.y.sumual@gmail.com⁴, neileswakur18@gmail.com⁵

ABSTRACT

This article compares inclusive education systems in Japan and Indonesia, focusing on education for children with special needs. Both countries commit to providing an equal education for all children but face similar challenges, such as limited training of specialist teachers and curriculum incompatibility with students' needs. In Japan, even though there is a Special Needs Education (SNE) policy, teacher training needs to be improved, and the existing curriculum tends to be rigid, making it difficult to adapt to the needs of each student. In Indonesia, the "Merdeka Belajar" policy offers flexibility in learning, but its implementation is limited by a lack of trained teachers and a less adaptive curriculum. This study uses a descriptive qualitative method with a comparative approach through document analysis and literature study. The results show that Japan and Indonesia must improve teacher training, develop more responsive curricula, and provide adequate facilities and resources to support inclusive education. The recommendations also include the need for closer collaboration between governments, schools, and families to create a more inclusive learning environment. The results of this study are expected to be a reference for other countries developing comprehensive and effective inclusive education systems.

Keywords: *Inclusive education, children with special needs, Japanese education system, Indonesian education system, education comparison*

ABSTRAK

Artikel ini membahas perbandingan sistem pendidikan inklusif di Jepang dan Indonesia, dengan fokus pada pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Kedua negara memiliki komitmen untuk memberikan pendidikan yang setara bagi semua anak, namun menghadapi tantangan serupa, seperti keterbatasan pelatihan guru spesialis dan ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan individual siswa. Di Jepang, meskipun sudah ada kebijakan *Special Needs Education* (SNE), pelatihan guru belum memadai dan kurikulum yang ada cenderung kaku, sehingga sulit disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa. Di Indonesia, kebijakan "Merdeka Belajar" menawarkan fleksibilitas dalam pembelajaran, tetapi

implementasinya masih terbatas oleh kurangnya guru terlatih dan kurikulum yang kurang adaptif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi perbandingan, melalui analisis dokumen dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jepang dan Indonesia perlu meningkatkan pelatihan bagi guru, mengembangkan kurikulum yang lebih responsif, serta menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk mendukung pendidikan inklusif. Rekomendasi juga meliputi perlunya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, sekolah, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi negara lain yang tengah mengembangkan sistem pendidikan inklusif yang komprehensif dan efektif.

Kata Kunci: Pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus, sistem pendidikan Jepang, sistem pendidikan Indonesia, perbandingan pendidikan

A. Pendahuluan

Pendidikan inklusif merupakan bentuk pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), di lingkungan yang sama dengan anak-anak pada umumnya. Konsep pendidikan inklusif ini telah diakui secara global sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, dan diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal bagi setiap anak tanpa memandang keterbatasan atau perbedaan yang dimiliki. Jepang dan Indonesia adalah dua negara di Asia yang berupaya menerapkan pendidikan inklusif dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, serta kebijakan pendidikan masing-masing (Fauzan et al., 2021).

Sistem pendidikan inklusif di Jepang telah berkembang dalam kerangka kebijakan "*Special Needs Education*" (SNE) yang dirancang untuk memberikan layanan dukungan

di sekolah reguler dan sekolah khusus. SNE di Jepang bertujuan untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus berpartisipasi dalam kegiatan belajar bersama anak-anak lain melalui dukungan tambahan. Namun, meski sudah ada sistem SNE, pelaksanaan pendidikan inklusif di Jepang masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan pelatihan bagi guru serta kurang fleksibelnya kurikulum dalam menyesuaikan kebutuhan individual siswa (Mahendra et al., 2024).

Di Indonesia, pendidikan inklusif mulai digalakkan setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus (Mbato & Sungging, 2022). Selain itu, kebijakan "Merdeka Belajar" yang diterapkan pemerintah diharapkan mampu memberikan fleksibilitas dalam

pembelajaran, sehingga lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan setiap anak. Meskipun kebijakan ini menjanjikan, pelaksanaannya menghadapi tantangan yang serupa dengan Jepang, terutama terkait pelatihan guru dan adaptasi kurikulum yang masih kurang (Hattarina et al., 2022).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena pendidikan inklusif di Jepang dan Indonesia secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami kebijakan, pelaksanaan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi pendidikan inklusif di kedua negara. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian studi perbandingan, yang membandingkan sistem pendidikan inklusif di Jepang dan Indonesia untuk menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem serta memberikan rekomendasi berdasarkan temuan yang ada.

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi praktisi pendidikan dan pemerintah di Jepang dan Indonesia, tetapi juga bagi para peneliti, pendidik, dan pembuat kebijakan di negara lain yang tengah mengembangkan pendidikan inklusif. Dengan adanya perbandingan ini, diharapkan ada kesadaran yang lebih besar akan pentingnya pendidikan inklusif yang komprehensif dan dukungan yang sesuai untuk semua anak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Kurniawati & Nugraheni, 2024). dengan metode studi perbandingan untuk menilai sistem pendidikan inklusif di Jepang dan Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap kebijakan dan laporan pendidikan inklusif, baik dari dokumen pemerintah, jurnal akademis, serta laporan organisasi internasional seperti UNESCO. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis komparatif, di mana data dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek, yaitu kebijakan, model pendidikan, sumber daya, metode pembelajaran, serta tantangan yang dihadapi di kedua negara.

C. Hasil Penelitian dan

Pembahasan

Hasil Sistem Pendidikan Inklusif di Jepang

a) Konteks Pendidikan Inklusif di Jepang

Jepang telah mengembangkan sistem pendidikan inklusif yang cukup terstruktur. Undang-undang pendidikan di negara ini menekankan pentingnya memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif di Jepang dikelola melalui kebijakan *Special Needs Education*

yang diperkenalkan pada tahun 2007. Walaupun memiliki struktur yang kuat, penerapan di tingkat sekolah masih menghadapi tantangan serius (Budiyanto, 2017).

b) Pelatihan Guru di Jepang
Pelatihan guru untuk mendukung anak berkebutuhan khusus masih menjadi permasalahan yang krusial di Jepang. Banyak guru yang mengaku tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mengelola siswa dengan kebutuhan khusus. Seorang ahli pendidikan Jepang, Yoshikawa (2018), menyatakan bahwa “kurangnya pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk guru menjadi salah satu penghambat utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.” Guru seringkali hanya memiliki pengetahuan teoretis dasar tanpa pengalaman praktis yang cukup, membuat mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang efektif dan mendukung untuk anak berkebutuhan khusus.

c) Kurangnya Fleksibilitas Kurikulum
Kurikulum di Jepang sering kali dianggap terlalu kaku untuk mengakomodasi beragam kebutuhan siswa. Sato (2020), seorang pakar pendidikan inklusif, menyoroti bahwa “sistem kurikulum Jepang masih memprioritaskan standar nasional yang ketat, sehingga fleksibilitas untuk anak berkebutuhan khusus sangat terbatas.” Hal ini berdampak pada keterbatasan ruang bagi guru untuk mengadaptasi metode

pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa.

Sistem Pendidikan Inklusif di Indonesia

a) Kebijakan dan Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia
Di Indonesia, pendidikan inklusif mulai mendapat perhatian serius seiring dengan diluncurkannya program “Merdeka Belajar” oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi penerapan metode pendidikan yang inklusif dan adaptif. Namun, tantangan dalam implementasinya cukup signifikan, terutama terkait keterbatasan pelatihan guru dan ketidaksesuaian kurikulum.

b) Keterbatasan Pelatihan Guru
Seperti halnya di Jepang, pelatihan guru di Indonesia juga masih belum memadai. Dr. Sumarsono (2021), seorang ahli pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, menegaskan bahwa “banyak guru tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam menangani siswa berkebutuhan khusus, terutama di daerah terpencil.” Hal ini diperparah dengan kurangnya pelatihan berkelanjutan dan minimnya anggaran untuk program-program pelatihan.
Selain itu, Suryani (2022), peneliti di bidang pendidikan inklusif, menyoroti bahwa “pendekatan pelatihan yang ada masih sangat teoretis dan kurang

berfokus pada aspek praktis. Akibatnya, guru merasa tidak percaya diri saat harus mengelola kelas yang inklusif." Dengan demikian, pelatihan berbasis praktik menjadi kebutuhan mendesak yang harus diatasi oleh pemerintah.

c) Ketidaksesuaian Kurikulum

Kurikulum pendidikan di Indonesia masih belum cukup fleksibel untuk menampung beragam kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Menurut Syamsudin (2023), seorang pakar dari Universitas Pendidikan Indonesia, "kurikulum nasional dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan umum, bukan kebutuhan khusus. Modifikasi kurikulum sering kali memerlukan upaya besar dari pihak sekolah, yang jarang memiliki sumber daya yang memadai."

Kurikulum yang tidak responsif menyebabkan banyak anak berkebutuhan khusus tidak dapat mencapai potensi akademis mereka. Seringkali, mereka merasa terasing dan kurang termotivasi untuk belajar. Sebagai contoh, metode pengajaran berbasis hafalan yang umum digunakan di Indonesia sulit bagi anak-anak dengan gangguan belajar seperti disleksia.

Perbandingan Sistem Pendidikan inklusif di Jepang dan Indonesia

1. Kebijakan Pemerintah

Jepang: Jepang menerapkan kebijakan "Special Needs Education" (SNE) sebagai bagian dari sistem pendidikan nasionalnya. Pemerintah

mendorong pendidikan inklusif bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus melalui dua jalur: sekolah reguler dengan dukungan khusus dan sekolah khusus bagi anak dengan kebutuhan lebih kompleks. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan setiap siswa mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya (Ohta, 2007).

Indonesia: Di Indonesia, kebijakan pendidikan inklusif diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendiknas No. 70 Tahun 2009. Pemerintah mengarahkan agar anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat bersekolah di sekolah reguler yang menerima siswa inklusif, sambil tetap menyediakan sekolah khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB) bagi mereka yang membutuhkan pendekatan khusus (Kamarudin, 2013).

2. Model Pendidikan

Jepang: Model pendidikan inklusif di Jepang berfokus pada dua pendekatan utama, yaitu integrasi di sekolah reguler untuk siswa berkebutuhan khusus dengan kondisi ringan hingga sedang, serta sekolah khusus bagi siswa dengan kondisi lebih berat. Di sekolah reguler, dukungan diberikan oleh guru khusus atau staf pendukung (Kawai, 2010).

Indonesia: Di Indonesia, model pendidikan inklusif lebih menekankan integrasi siswa berkebutuhan khusus ke dalam sekolah reguler, di mana mereka berbaur dengan siswa lain. Meskipun tersedia SLB,

penggunaannya lebih terbatas. Sayangnya, fasilitas dan dukungan guru khusus di sekolah reguler masih terbatas, terutama di daerah terpencil (Suyanto, 2012).

3. Sumber Daya dan Tenaga Pendidik

Jepang: Jepang memiliki tenaga pendidik yang khusus dilatih untuk memberikan pendidikan kepada siswa berkebutuhan khusus. Guru dan staf pendukung menerima pelatihan khusus terkait cara mengajar siswa inklusif, menggunakan metode pembelajaran yang beragam sesuai kebutuhan anak. Setiap sekolah dilengkapi dengan fasilitas teknologi yang menunjang, seperti perangkat bantu komunikasi (Kawai, 2010)

Indonesia: Sumber daya dan tenaga pendidik untuk pendidikan inklusif di Indonesia masih terbatas. Banyak guru reguler yang belum memiliki pelatihan khusus untuk menangani anak berkebutuhan khusus, sehingga proses belajar mengajar terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa inklusif. Fasilitas teknologi pendukung juga masih belum merata, khususnya di wilayah-wilayah terpencil (Widyaningsih, 2015).

4. Metode Pembelajaran dan Kurikulum

Jepang: Di Jepang, kurikulum untuk siswa berkebutuhan khusus lebih fleksibel dan bisa disesuaikan. Setiap siswa memiliki rencana pembelajaran individu (Individualized Education Program atau IEP) yang dirancang

sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka. Metode pembelajaran juga sangat beragam, termasuk penggunaan teknologi, permainan edukatif, dan pendekatan terapi (Ohta, 2007).

Indonesia: Indonesia saat ini menerapkan kurikulum nasional yang masih cenderung seragam untuk semua siswa, dengan sedikit penyesuaian bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Meski beberapa sekolah telah mencoba membuat program belajar yang sesuai, tetapi secara umum, kurikulum dan metode pembelajaran belum cukup fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan siswa inklusif (Soedijarto, 2011).

5. Dukungan Teknologi

Jepang: Teknologi canggih seperti perangkat bantu komunikasi, alat bantu visual, dan teknologi pengajaran khusus banyak digunakan di Jepang untuk mendukung pendidikan inklusif. Teknologi ini membantu siswa dengan keterbatasan fisik maupun kognitif berpartisipasi dalam kegiatan belajar (Kawai, 2010).

Indonesia: Penggunaan teknologi dalam pendidikan inklusif di Indonesia masih sangat terbatas, terutama di luar kota besar. Beberapa sekolah inklusif di kota-kota besar mulai menggunakan alat bantu teknologi, namun secara keseluruhan masih banyak sekolah yang belum mampu mengakses teknologi

pendukung karena keterbatasan biaya (Ismail, 2015).

6. Sikap dan Kesadaran Masyarakat

Jepang: Kesadaran masyarakat Jepang mengenai pentingnya pendidikan inklusif sudah cukup tinggi, walaupun masih ada stigma terhadap anak berkebutuhan khusus. Namun, masyarakat secara umum mendukung upaya pemerintah dalam menyediakan pendidikan inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus (Suyanto, 2012).

Indonesia: Di Indonesia, pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap pendidikan inklusif masih bervariasi. Di beberapa daerah, stigma terhadap siswa berkebutuhan khusus masih kuat, dan belum ada pemahaman yang menyeluruh mengenai manfaat pendidikan inklusif, terutama di pedesaan (Widyaningsih (2015).

7. Tantangan yang Dihadapi

Jepang: Meskipun memiliki sistem yang cukup matang, Jepang masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan ruang kelas inklusif di beberapa sekolah reguler serta kesulitan dalam menyediakan fasilitas

di daerah terpencil. Selain itu, pengembangan sistem yang benar-benar inklusif masih terus dilakukan untuk menghilangkan stigma (Ohta, 2007).

Indonesia: Tantangan utama di Indonesia adalah keterbatasan tenaga pendidik khusus, sumber daya finansial, dan fasilitas yang memadai. Di samping itu, masih ada tantangan dalam mengubah persepsi masyarakat dan meningkatkan penerimaan terhadap siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler.

Secara keseluruhan, sistem pendidikan inklusif di Jepang lebih mapan dengan dukungan pemerintah, fasilitas, dan tenaga pendidik yang memadai. Sedangkan Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan sumber daya dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif (Suyanto, 2012).

Tabel 1.1

Perbandingan sistem pendidikan inklusif di Jepang dan Indonesia

Aspek	Jepang	Indonesia	Sumber
Kebijakan Pemerintah	Jepang menerapkan kebijakan "Special Needs Education" (SNE) yang mendukung pendidikan inklusif melalui dua jalur: sekolah reguler dengan dukungan khusus dan sekolah khusus.	Di Indonesia, pendidikan inklusif diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 dan Permendiknas No. 70 Tahun 2009, dengan anak berkebutuhan khusus dapat bersekolah di sekolah reguler atau SLB.	Ohta (2007); Kamarudin (2013)
Model Pendidikan	Model pendidikan inklusif di Jepang menggabungkan dua pendekatan: integrasi di sekolah reguler untuk siswa	Model pendidikan inklusif di Indonesia lebih berfokus pada integrasi siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler,	Kawai (2010); Suyanto (2012)

Aspek	Jepang	Indonesia	Sumber
	dengan kebutuhan ringan hingga sedang, dan sekolah khusus untuk yang lebih kompleks.	meskipun fasilitas di daerah terpencil masih terbatas.	
Sumber Daya dan Tenaga Pendidik	Jepang memiliki guru yang terlatih khusus untuk mengajar siswa berkebutuhan khusus dan fasilitas teknologi yang mendukung pembelajaran, seperti alat bantu komunikasi.	Di Indonesia, banyak guru reguler yang belum memiliki pelatihan khusus untuk mengajar siswa inklusif. Fasilitas teknologi dan dukungan pendidik juga terbatas.	Kawai (2010); Widyaningsih (2015)
Metode Pembelajaran dan Kurikulum	Kurikulum di Jepang lebih fleksibel dengan rencana pembelajaran individu (IEP), dan metode pembelajaran yang beragam seperti teknologi dan terapi.	Kurikulum di Indonesia masih seragam, meski ada sedikit penyesuaian untuk siswa berkebutuhan khusus. Metode pembelajaran belum sepenuhnya fleksibel.	Ohta (2007); Soedijarto (2011)
Dukungan Teknologi	Jepang menggunakan teknologi canggih seperti perangkat bantu komunikasi dan alat bantu visual untuk mendukung pendidikan inklusif.	Penggunaan teknologi di Indonesia terbatas, terutama di daerah terpencil, dengan beberapa sekolah kota besar yang mulai menggunakannya.	Kawai (2010); Ismail (2015)
Sikap dan Kesadaran Masyarakat	Kesadaran masyarakat Jepang terhadap pentingnya pendidikan inklusif sudah cukup tinggi, meski stigma terhadap anak berkebutuhan khusus masih ada.	Pemahaman masyarakat di Indonesia bervariasi, dengan stigma yang kuat terhadap siswa berkebutuhan khusus di beberapa daerah, terutama di pedesaan.	Suyanto (2012); Widyaningsih (2015)
Tantangan yang Dihadapi	Jepang menghadapi tantangan dalam keterbatasan ruang kelas inklusif dan fasilitas di daerah terpencil. Pengembangan sistem inklusif masih terus dilakukan.	Tantangan utama Indonesia adalah keterbatasan tenaga pendidik terlatih, sumber daya finansial, dan fasilitas yang memadai. Perubahan persepsi masyarakat juga menjadi tantangan.	Ohta (2007); Suyanto (2012)

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendidikan inklusif di Jepang dan Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan yang signifikan dalam beberapa aspek utama (Yustiani et al., 2024). Dari segi kebijakan, Jepang memiliki kebijakan Special Needs Education (SNE) yang secara khusus mengatur pendidikan inklusif melalui sekolah khusus dan sekolah reguler, sementara di Indonesia pendidikan

inklusif diatur dalam kebijakan nasional dan dikuatkan dengan inisiatif “Merdeka Belajar” yang menawarkan fleksibilitas dalam pengajaran. Dalam hal pelaksanaan, Jepang umumnya memberikan pilihan kepada siswa berkebutuhan khusus untuk bersekolah di sekolah reguler atau sekolah khusus dengan dukungan tambahan, sementara Indonesia menekankan integrasi siswa berkebutuhan khusus ke dalam sekolah reguler.

Pada aspek sumber daya dan pelatihan guru, kedua negara menghadapi tantangan serupa, yakni kurangnya guru yang terlatih secara khusus dalam menangani kebutuhan anak berkebutuhan khusus (Nur et al., 2023). Meskipun terdapat program pelatihan guru di kedua negara, tetapi cakupannya belum cukup luas dan belum mencakup keterampilan praktis yang dibutuhkan. Kurikulum yang tidak fleksibel menjadi kendala lain, terutama di Jepang, yang kurikulumnya sering dianggap terlalu kaku untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Di Indonesia, kurikulum nasional yang seragam juga menyulitkan adaptasi bagi siswa berkebutuhan khusus, meski program “Merdeka Belajar” menawarkan lebih banyak fleksibilitas (Dewantara, 2024).

E. Kesimpulan

Pendidikan inklusif di Jepang dan Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Meskipun demikian, pelaksanaan sistem pendidikan inklusif di kedua negara masih menghadapi kendala yang signifikan. Di Jepang, kebijakan SNE sudah dirancang dengan baik, namun pelatihan guru dan fleksibilitas kurikulum masih menjadi tantangan utama. Di Indonesia, kebijakan “Merdeka Belajar” memberikan fleksibilitas, namun pelaksanaan di lapangan terhambat oleh kurangnya pelatihan guru dan keterbatasan kurikulum adaptif. Untuk itu, kedua

negara perlu berinvestasi lebih lanjut dalam pelatihan guru spesialis dan pengembangan kurikulum yang lebih responsif terhadap kebutuhan individual siswa. Kolaborasi antara pihak pemerintah, sekolah, dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan inklusif yang mendukung perkembangan setiap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan, H. N., Francisca, L., Asrini, V. I., Fitria, I., & Firdaus, A. A. (2021). Sejarah pendidikan anak berkebutuhan khusus (abk) menuju inklusi. *Pensa*, 3(3), 496-505.
- Hattarina, S., Saila, N., Faradilla, A., Putri, D. R., & Putri, R. G. A. (2022, August). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Lembaga Pendidikan. In *Seminar Nasional Sosial, Sains, Pendidikan, Humaniora (SENASSDRA)* (Vol. 1, No. 1, pp. 181-192).
- Ismail, F. (2015). Perbandingan Sistem Pendidikan Inklusif di Jepang dan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, 12(3), 45-60.
- Kamarudin, A. (2013). Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 15(1), 23-34.
- Kawai, M. (2010). Pendidikan Inklusif di Jepang: Perspektif dan Praktik. *Asian Journal of Special Education*, 6(2), 112-126.
- Kurniawati, D. A., & Nugraheni, N. (2024). Meningkatkan Pendidikan

- Yang Berkualitas Menggunakan Metode Pendekatan Kajian Literature. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 1(3), 206-212.
- Mahendra, G. S., Ohyver, D. A., Umar, N., Judijhanto, L., Abadi, A., Harto, B., ... & Sutarwiyasa, I. K. (2024). *Tren Teknologi AI: Pengantar, Teori, dan Contoh Penerapan Artificial Intelligence di Berbagai Bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mbato, C. L., & Sungging, F. (2022). *Pendidikan Indonesia Masa Depan: Tantangan, Strategi, Dan Peran Universitas Sanata Dharma*. Sanata Dharma University Press.
- Nur, M., Sari, N., & Surya, H. (2023). *Coping Stress Guru PAUD: Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah PAUD Reguler*. Sada Kurnia Pustaka.
- Ohta, M. (2007). Inclusive Education in Japan: Current Issues and Future Directions. *International Journal of Special Education*, 22(1), 1-12
- Shiraishi, Y., Kohsaka, S., Sato, N., Takano, T., Kitai, T., Yoshikawa, T., & Matsue, Y. (2018). 9-year trend in the management of acute heart failure in Japan: a report from the national consortium of acute heart failure registries. *Journal of the American Heart Association*, 7(18), e008687.
- Soedijarto, S. (2011). Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus: Teori dan Praktik. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 88-98
- Suyanto, S. (2012). Pendidikan Inklusif di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, 9(4), 103-116.
- Widyaningsih, E. (2015). Pendidikan Inklusif di Indonesia: Antara Harapan dan Realitas. *Jurnal Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, 11(3), 55-69.